



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana

Terakreditasi UNGGUL

SK BAN-PT No. 1598/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022

Tax Review Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan
Nilai PT X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak

Skripsi

Oleh

Elvina Putri Santoso

6081901098

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana

Terakreditasi UNGGUL

SK BAN-PT No. 1598/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022

Tax Review Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan
Nilai PT X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak

Skripsi

Oleh

Elvina Putri Santoso

6081901098

Pembimbing

Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Bisnis
Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Elvina Putri Santoso
Nomor Pokok : 6081901098
Judul : *Tax Review* Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai PT X
Untuk menilai Kepatuhan Wajib Pajak

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 16 Januari 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Sanerya Hendrawan, Ph.D

: 

Sekretaris
Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA.

: 

Anggota
Albert Mangapul Parulian Lumban Tobing, S.T., M.AB. :



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elvina Putri Santoso

NPM : 6081901098

Program Studi : Administrasi Bisnis

Judul : ***Tax Review Pajak Penghasilan dan Pajak***

Pertambahan Nilai PT X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Selain itu, pengumpulan dan penggunaan data di penelitian ini telah diketahui dan seijin dari pihak yang menjadi sumber data.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 5 Januari 2023

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and '2FE3BAJX316801509'. The signature is a cursive, stylized script.

Elvina Putri Santoso

ABSTRAK

Nama : Elvina Putri Santoso
NPM : 6081901098
Judul : *Tax Review* Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan
Nilai PT X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak

Penerimaan anggaran pembelanjaan negara yang berasal dari pajak sangat berpengaruh terhadap pembiayaan negara. Salah satu penunjang untuk pertumbuhan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Per akhir tahun 2021, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia mencapai 84%. Salah satu cara untuk mengukur kepatuhan dengan melakukan *tax review*.

Tax review pada penelitian ini, dilakukan dengan tujuan untuk melihat kepatuhan salah satu Wajib Pajak Badan yaitu PT X yang sudah berdiri sejak tahun 2007. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan besar menjual barang-barang elektronik dan suku cadang lainnya. Aspek perpajakan yang akan dilihat adalah seluruh Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2018 sampai 2020. Dari hasil *review* yang dilakukan, akan terlihat tingkat kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan seluruh aspek perpajakan yang berada di PT X dan membandingkan hasil pelaksanaan perpajakan pada PT X dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari *tax review* yang telah dilakukan, PT X masih kurang patuh karena masih terdapat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dan keterlambatan penyeteroran PPh Pasal 21 dan 23.

Kata Kunci: Pajak, *Tax Review*, Wajib Pajak Badan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Kepatuhan

ABSTRACT

Name : Elvina Putri Santoso
Student ID : 60819901098
Title : *Tax Review for Income Tax and Value Added Tax in PT X to Asses Tax Compliance*

Revenue from the state expenditure budget originating from taxes is very influential on state financing. One of the supports for the growth of tax revenues is taxpayer compliance. As of the end of 2021, the taxpayer compliance rate in Indonesia has reached 84%. One way to measure compliance is by conducting a tax review.

The tax review in this study was carried out with the aim of observing the compliance of one of the Corporate Taxpayers, namely PT X, which was established in 2007. This company is engaged in wholesale trading selling electronic goods and other spare parts. The taxation aspects that will be examined are all Income Tax and Value Added Tax from 2018 to 2020. From the results of the review conducted, it will be seen the level of company compliance in implementing its tax rights and obligations.

The research method used is descriptive analysis study. This research was conducted by collecting data relating to all aspects of taxation at PT X and comparing the results of tax implementation at PT X with the applicable laws and regulations. The results of the tax review that has been carried out, PT X is still not compliant because there are still errors in calculating income tax Article 21 and delays in depositing income tax Articles 21 and 23.

Keywords: tax, tax review, corporate taxpayer, income tax, value added tax, taxpayer right and obligation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya, penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tax Review Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai PT X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak*” tepat waktu sesuai dengan harapan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 2022.

Salah satu jenis kajian skripsi yang dapat diteliti di Jurusan Administrasi Bisnis adalah kajian fungsi bisnis di bidang perpajakan Melalui skripsi yang dibuat oleh penulis ini, penulis berharap bisa menerapkan ilmu yang sudah penulis dapat. Kajian penulisan skripsi ini adalah tax review. Tax review merupakan penelaahan perpajakan pada salah satu objek penelitian, pada kesempatan ini objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah PT X sebaga Wajib Pajak Badan.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang ada pada penulisan ini. Dengan demikian, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran terkait penulisan skripsi ini. Hasil penelitian ini, semoga bisa membantu PT X untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain PT X, penulis berharap penulisan skripsi yang disusun oleh penulis dapat bermanfaat dan menambah wawasan terkait perpajakan.

Banyak dukungan, bimbingan, dan doa yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis. Maka dari itu, penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Mama dan Papa yang selalu mendukung segala keputusan yang dilakukan oleh penulis sampai membantu penulis hingga berhasil menyusun skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Bapak Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA. yang membimbing penulis dari awal sampai akhir penyusunan skripsi, memberi ilmu, waktu, perhatian, dan tenaga sampai akhirnya penulis berhasil menyusun skripsi ini dengan baik.
3. Ai Ata sebagai sahabat mama yang berkenan agar penulis dapat melakukan penelitian di PT X, yang mau memberikan data kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Grace dan Elina, kedua sahabat penulis yang selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat, dan pengertian ditengah kesibukan masing-masing tetap menghibur penulis sampai penulis berhasil mengerjakan skripsi ini
5. Adik-adik penulis yang selalu memberi dukungan terutama Isaac yang mau menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Justina Maria Setiawan, S.E., M, Ak., Ak., CA, salah satu dosen pajak yang memberikan ilmu terkait perpajakan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan staff Jurusan Administrasi Bisnis yang memberikan ilmu administasi bisnis selama penulis berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
8. Saudara dan kerabat penulis, yang mau membantu dan memberikan dukungan dan doa kepada penulis sampai penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman yang selama perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini selalu mendukung dan menyemangati penulis, Febriana Michelle, Dricya Amadea, Devina, Mentari, Kintan, Kartika, Verren
10. Raafi, teman satu bimbingan skripsi yang sama-sama memberi dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan teknis penulisan.
11. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendukung penulis

Terimakasih atas seluruh dukungan, doa, dan bimbingan yang diberikan.

Semoga Tuhan selalu memberkati seluruh pihak yang sudah mendukung penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca.

Bandung, 31 Desember 2022

Elvina Putri Santoso

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTARCT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 Permasalahan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Objek Penelitian.....	7
BAB 2 Kerangka Pemikiran dan Metodologi	9
2.1 Teori dan Konsep.....	9
2.1.1 Proses Bisnis Perdagangan Besar	9
2.1.2 Definisi Pajak.....	11
2.1.3 Fungsi Pajak.....	12
2.1.4 Hukum Pajak.....	13
2.1.5 Pemungutan Pajak.....	23
2.1.5.1 Teori Pembenaan Pungutan Pajak.....	23
2.1.5.2 Tata Cara Pemungutan Pajak	27
2.1.5.3 Hambatan Pemungutan Pajak.....	31
2.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	32
2.1.7 Surat Pemberitahuan Pajak dan Surat Setoran Pajak.....	36
2.1.8 Pajak Penghasilan	42
2.1.8.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	52
2.1.8.2 Pajak Penghasilan Pasal 22	58
2.1.8.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	59
2.1.8.4 Pajak Penghasilan Pasal 25	65
2.1.8.5 Pajak Penghasilan Pasal 29	66
2.1.8.6 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	67
2.1.9 Pajak Pertambahan Nilai.....	71
2.1.10 Pembukuan.....	76
2.1.11 Kepatuhan	78
2.1.12 <i>Tax Review</i>	84
2.2 Metodologi	85

2.2.1 Metode Penelitian	85
2.2.2 Operasionalisasi Variabel	89
BAB 3 Hasil dan Temuan	93
3.1 Hasil Penelitian	93
3.1.1 Proses Bisnis PT X	93
3.1.2 Struktur Organisasi PT X Dengan Tanggung Jawabnya	94
3.1.3 Sistem Penggajian dan Kesejahteraan Karyawan	96
3.1.4 Status Kewajiban Perpajakan PT X	97
3.2 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan PT X.....	98
3.2.1 Hak Perpajakan PT X	98
3.2.2 Kewajiban Perpajakan PT X.....	100
3.2.2.1 Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 21 Tahun 2018 Sampai 2020.....	100
3.2.2.2 Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 22 Tahun 2018 Sampai 2020.....	105
3.2.2.3 Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 23 Tahun 2018 Sampai 2020.....	105
3.2.2.4 Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 25 Tahun 2018 Sampai 2020.....	106
3.2.2.5 Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 29 Tahun 2018 Sampai 2020.....	110
3.2.2.6 Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018 Sampai 2020.....	111
3.2.2.7 Kewajiban Perpajakan PPN Tahun 2018 Sampai 2020.....	111
3.3 Pembahasan Hasil Penelitian	112
3.3.1 Tax Review Atas Hak Perpajakan PT X Tahun 2018 Sampai 2020	112
3.3.2 Tax Review Atas Kewajiban Perpajakan PT X Tahun 2018 Sampai 2020	115
3.3.2.1 Tax Review Atas Kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2018 Sampai 2020.....	135
3.3.2.2 Tax Review Atas Kewajiban PPh Pasal 22 Tahun 2018 Sampai 2020.....	133
3.3.2.3 Tax Review Atas Kewajiban PPh Pasal 23 Tahun 2018 Sampai 2020.....	140
3.3.2.4 Tax Review Atas Kewajiban PPh Pasal 25 Tahun 2018 Sampai 2020.....	155
3.3.2.5 Tax Review Atas Kewajiban PPh Pasal 29 Tahun 2018 Sampai 2020.....	164
3.3.2.6 Tax Review Atas Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018 Sampai 2020.....	166
3.3.2.7 Tax Review Atas Kewajiban PPN Tahun 2018 Sampai 2020.....	171

3.4 Temuan	184
3.4.1 Pemanfaatan Hak Perpajakan Tahun 2018 Sampai 2020	185
3.4.2 Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2018 Sampai 2020.....	188
3.4.3 Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 22 Tahun 2018 Sampai 2020.....	206
3.4.4 Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 23 Tahun 2018 Sampai 2020.....	209
3.4.5 Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 25 Tahun 2018 Sampai 2020.....	225
3.4.6 Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 29 Tahun 2018 Sampai 2020.....	239
3.4.7 Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018 Sampai 2020	245
3.4.8 Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Kewajiban PPh Tahun 2018 Sampai 2020	250
3.4.9 Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Masing-Masing Kewajiban Perpajakan PT X Selama Tahun 2018 Sampai 2020.....	264
 BAB 4 Kesimpulan dan Rekomendasi.....	 283
4.1 Kesimpulan	283
4.2 Rekomendasi.....	291
4.3 Implikasi	294
 DAFTAR PUSTAKA	 297
 DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak Tahun 2017 Sampai 2022	3
Tabel 2.1	Sanksi Administrasi Berupa Denda	14
Tabel 2.2	Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Kenaikan	15
Tabel 2.3	Sanksi Administrasi Berupa Denda	18
Tabel 2.4	Sanksi Administrasi Berupa Bunga	19
Tabel 2.5	Batas Penyetoran PPh	39
Tabel 2.6	Batas Pelaporan SPT.....	40
Tabel 2.7	Lapisan Tarif Untuk WP Orang Pribadi Dalam Negeri.....	54
Tabel 2.8	Lapisan Tarif Untuk WP Orang Pribadi Dalam Negeri.....	54
Tabel 2.9	Tarif Pemotongan PPh Pasal 23.....	60
Tabel 2.10	Cara Perhitungan PPh Pasal 25.....	66
Tabel 2.11	Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) Untuk Jasa Atas Konstruksi.....	68
Tabel 2.12	Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) Untuk Jasa Atas Konstruksi.....	69
Tabel 2.13	Pengukuran Tingkat Kepatuhan.....	88
Tabel 2.14	Operasionalisasi Variabel	90
Tabel 3.1	Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap yang Dibuat Oleh PT X	101
Tabel 3.2	Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap yang Dibuat Oleh PT X	104
Tabel 3.3	Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 25 yang Dilakukan Oleh PT X.....	107
Tabel 3.4	Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	115
Tabel 3.5	Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2018.....	116
Tabel 3.6	Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2019.....	118
Tabel 3.7	Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2020.....	120
Tabel 3.8	Contoh Perhitungan Untuk Pegawai Tidak Tetap Tahun 2018	122
Tabel 3.9	Contoh Perhitungan Untuk Pegawai Tidak Tetap Tahun 2019	123
Tabel 3.10	Contoh Perhitungan Untuk Pegawai Tidak Tetap Tahun 2020	124
Tabel 3.11	Contoh Perhitungan Untuk Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak berkesinambungan Tahun 2018.....	125
Tabel 3.12	Contoh Perhitungan Untuk Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak berkesinambungan Tahun 2019.....	127
Tabel 3.13	Contoh Perhitungan Untuk Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak berkesinambungan Tahun 2020.....	127
Tabel 3.14	Data Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2018.....	128
Tabel 3.15	Data Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2019	129
Tabel 3.16	Data Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2020.....	130
Tabel 3.17	Data Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2018.....	132
Tabel 3.18	Data Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2019	133
Tabel 3.19	Data Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2020.....	134

Tabel 3.20	Pungutan PPh Pasal 22 Atas Impor yang Dilakukan PT X Tahun 2018	135
Tabel 3.21	Pungutan PPh Pasal 22 Atas Impor yang Dilakukan PT X Tahun 2019	137
Tabel 3.22	Pungutan PPh Pasal 22 Atas Impor yang Dilakukan PT X Tahun 2020	138
Tabel 3.23	Data Tanggal Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2018 Sampai 2020..	139
Tabel 3.24	Data Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2018.....	140
Tabel 3.25	Data Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2019.....	142
Tabel 3.26	Data Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2020.....	143
Tabel 3.27	Data Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2018.....	144
Tabel 3.28	Data Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2019.....	145
Tabel 3.29	Data Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2020.....	146
Tabel 3.30	Data PPh Pasal 23 yang Dipotong Untuk PT X Selama tahun 2018	147
Tabel 3.31	Data PPh Pasal 23 yang Dipotong Untuk PT X Selama tahun 2019	150
Tabel 3.32	Data PPh Pasal 23 yang Dipotong Untuk PT X Selama tahun 2020	152
Tabel 3.33	Data Tanggal Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2018 Sampai 2020..	155
Tabel 3.34	Data Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2018.....	156
Tabel 3.35	Data Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2019.....	157
Tabel 3.36	Data Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2020.....	158
Tabel 3.37	Data Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2018	160
Tabel 3.38	Data Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2019	162
Tabel 3.39	Data Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2020	163
Tabel 3.40	Data Penyetoran PPh Pasal 29 Kurang Bayar dan Pelaporan SPT Tahun 2018 Badan	164
Tabel 3.41	Data Penyetoran PPh Pasal 29 Kurang Bayar dan Pelaporan SPT Tahun 2019 Badan	165
Tabel 3.42	Data Penyetoran PPh Pasal 29 Kurang Bayar dan Pelaporan SPT Tahun 2020 Badan	166
Tabel 3.43	Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Sebagai Pemotong Tahun 2020	168
Tabel 3.44	Data Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang Dilaporkan PT X	170
Tabel 3.45	Data Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018 Sampai 2020	171
Tabel 3.46	Perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar Tahun 2018	172
Tabel 3.47	Perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar Tahun 2019	175
Tabel 3.48	Perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar Tahun 2020	177
Tabel 3.49	Penyetoran PPN Kurang Bayar dan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018	179
Tabel 3.50	Penyetoran PPN Kurang Bayar dan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2019	181
Tabel 3.51	Penyetoran PPN Kurang Bayar dan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2020	182

Tabel 3.52	Hak yang Dimanfaatkan dan Tidak Dimanfaatkan Selama Tahun 2018 Sampai 2020	185
Tabel 3.53	Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Tahun 2018 Menurut Penulis	188
Tabel 3.54	Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Tahun 2019 Menurut Penulis	190
Tabel 3.55	Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Tahun 2020 Menurut Penulis	191
Tabel 3.56	Selisih PPh Pasal 21 Teratur Dalam Satu Tahun Menurut Perhitungan PT X dan Penulis	192
Tabel 3.57	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2018.....	193
Tabel 3.58	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2018	194
Tabel 3.59	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2019.....	195
Tabel 3.60	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2019	196
Tabel 3.61	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2020.....	198
Tabel 3.62	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2020	199
Tabel 3.63	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2018	200
Tabel 3.64	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2018	202
Tabel 3.65	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2019	203
Tabel 3.66	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2019	203
Tabel 3.67	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2020	204
Tabel 3.68	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2020	205
Tabel 3.69	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2018.....	207
Tabel 3.70	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2019.....	208
Tabel 3.71	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2020.....	209
Tabel 3.72	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2018.....	210
Tabel 3.73	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2018	211
Tabel 3.74	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2019.....	212
Tabel 3.75	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2019	213
Tabel 3.76	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2020.....	214
Tabel 3.77	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2020	215
Tabel 3.78	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2018	217

Tabel 3.79	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2018	218
Tabel 3.80	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2019	219
Tabel 3.81	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2019	220
Tabel 3.82	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2020	221
Tabel 3.83	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2020	222
Tabel 3.84	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2018.....	223
Tabel 3.85	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2019.....	224
Tabel 3.86	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2020.....	225
Tabel 3.87	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2018.....	226
Tabel 3.88	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2018	227
Tabel 3.89	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2019.....	228
Tabel 3.90	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2019	229
Tabel 3.91	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2020.....	230
Tabel 3.92	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2020	231
Tabel 3.93	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2018.....	233
Tabel 3.94	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2018	234
Tabel 3.95	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2019.....	235
Tabel 3.96	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2019	236
Tabel 3.97	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2020.....	237
Tabel 3.98	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2020	238
Tabel 3.99	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 29 Tahun 2018.....	239
Tabel 3.100	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 29 Tahun 2019.....	240
Tabel 3.101	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 29 Tahun 2020.....	241
Tabel 3.102	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018	242
Tabel 3.103	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019	243
Tabel 3.104	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020	244
Tabel 3.105	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2020	245
Tabel 3.106	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2020	246
Tabel 3.107	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018 ...	247
Tabel 3.108	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2019 ...	248

Tabel 3.109	Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2020 ...	249
Tabel 3.110	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPN Tahun 2018	251
Tabel 3.111	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPN Kurang Bayar Tahun 2018	252
Tabel 3.112	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPN Tahun 2019	253
Tabel 3.113	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPN Kurang Bayar Tahun 2019	254
Tabel 3.114	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPN Tahun 2020	256
Tabel 3.115	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPN Kurang Bayar Tahun 2020	257
Tabel 3.116	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018.....	258
Tabel 3.117	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2018	259
Tabel 3.118	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2019.....	260
Tabel 3.119	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2019	261
Tabel 3.120	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2020.....	262
Tabel 3.121	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2020	264
Tabel 3.122	Tingkat Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2018 Sampai 2020	264
Tabel 3.123	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2018 Sampai 2020	266
Tabel 3.124	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 22 Tahun 2018 Sampai 2020	267
Tabel 3.125	Tingkat Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Sebagai Pihak Ketiga Serta Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2018 Sampai 2020	269
Tabel 3.126	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 23 Tahun 2018 Sampai 2020	270
Tabel 3.127	Tingkat Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2018 Sampai 2020	272
Tabel 3.128	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 25 Tahun 2018 Sampai 2020	273
Tabel 3.129	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 29 dan Pelaporan PPh Badan Tahun 2018 Sampai 2020	274
Tabel 3.130	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 29 Tahun 2019 Sampai 2020	275
Tabel 3.131	Tingkat Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Sebagai Pihak Ketiga Serta Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018 Sampai 2020	277
Tabel 3.132	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018 Sampai 2020	278
Tabel 3.133	Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPN Kurang Bayar dan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018 Sampai 2020	280
Tabel 3.134	Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban	

PPh Pasal PPN Tahun 2018 Sampai 2020281

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Proses Bisnis PT X	93
Gambar 3.2	Struktur Organisasi PT X	95
Gambar 3.3	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2018	195
Gambar 3.4	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2019.....	197
Gambar 3.5	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasaal 21 Tahun 2020	199
Gambar 3.6	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2018	201
Gambar 3.7	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2019	203
Gambar 3.8	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2020	206
Gambar 3.9	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2018	207
Gambar 3.10	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2019	208
Gambar 3.11	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2020	209
Gambar 3.12	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2018	212
Gambar 3.13	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2019	214
Gambar 3.14	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2020	216
Gambar 3.15	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2018	218
Gambar 3.16	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2019	220
Gambar 3.17	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2020	222
Gambar 3.18	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2018	223
Gambar 3.19	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2019	224
Gambar 3.20	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2020	225
Gambar 3.21	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2018	227
Gambar 3.22	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun	

	2019	230
Gambar 3.23	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2020	232
Gambar 3.24	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2018	234
Gambar 3.25	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2019	236
Gambar 3.26	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2020	238
Gambar 3.27	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 29 Tahun 2018	240
Gambar 3.28	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 29 Tahun 2019.....	241
Gambar 3.29	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 29 Tahun 2020.....	242
Gambar 3.30	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018.....	243
Gambar 3.31	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019.....	243
Gambar 3.32	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020.....	244
Gambar 3.33	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2020	246
Gambar 3.34	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2020	247
Gambar 3.35	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018	248
Gambar 3.36	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2019	249
Gambar 3.37	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2020	250
Gambar 3.38	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPN Kurang Bayar Tahun 2018	253
Gambar 3.39	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPN Kurang Bayar Tahun 2019	255
Gambar 3.40	Grafik Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPN Kurang Bayar Tahun 2020	257
Gambar 3.41	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018	260
Gambar 3.42	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2019	262
Gambar 3.43	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2020	264
Gambar 3.44	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PPh Pasal 21 Tahun 2018 Sampai 2020	266
Gambar 3.45	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PPh Pasal 22 Tahun	

	2018 Sampai 2020	268
Gambar 3.46	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PPh Pasal 23 Tahun 2018 Sampai 2020	271
Gambar 3.47	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PPh Pasal 25 Tahun 2018 Sampai 2020	273
Gambar 3.48	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PPh Pasal 29 Tahun 2018 Sampai 2020	276
Gambar 3.49	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2018 Sampai 2020.....	279
Gambar 3.50	Grafik Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PPN Tahun 2018 Sampai 2020	281

BAB 1

Permasalahan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib setiap Warga Negara yang digunakan sebagai penerimaan pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang kemudian akan disingkat sebagai APBN). Berdasarkan Badan Pusat Statistik, sumber APBN terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dalam APBN terdiri dari PPh, PPN & PPnBM, PBB, BPHTB, cukai, pajak lainnya, dan Pajak Perdagangan Internasional. (bps.go.id, diunduh pada 13 Oktober 2022 pukul 11.10). Penerimaan APBN dari pajak sangat berpengaruh terhadap pembiayaan negara. Hal tersebut dapat dilihat dengan pemerintah melakukan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan APBN. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan hasil yang baik. Dilihat dengan adanya pertumbuhan penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun sebelumnya hingga bulan Juni 2022, pertumbuhan penerimaan pajak terus meningkat hingga 55,7%. (menpan.go.id, diunduh pada 13 Oktober 2022 pukul 11.20).

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak di dalam APBN setiap tahunnya berbeda. Pada tahun 2017, pemerintah membuat kebijakan *tax amnesty* untuk meningkatkan penerimaan pajak (news.ddtc.co.id, diunduh pada 13 Oktober 2022 pukul 13.53). Pada tahun 2018, kebijakan pajak cenderung berpihak pada UKM dengan memberikan tarif PPh final

0,5% (Kompas.com, diunduh pada 13 Oktober 2022 pukul 14.07). Pada tahun 2019, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi 3 aspek. Ketiga aspek ini diantaranya penguatan pelayanan pajak, penegakan hukum, dan pengawasan kepatuhan pajak. Tujuan dari kebijakan yang dilakukan adalah mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing. (news.ddtc.co.id, diunduh pada 13 Oktober 2022 pukul 15.10). Pada tahun 2020, kebijakan perpajakan berubah banyak akibat dari adanya pandemi COVID-19. Kebijakan ini berupa aturan di bidang ekonomi khususnya perpajakan untuk realisasi pembebasan atau pengurangan pajak (perpajakan-id.ddtc.co.id, diunduh pada 13 Oktober 2022 pukul 15.30). Pada tahun 2021, kebijakan yang diberikan berupa perpanjangan Peraturan Menteri Keuangan (yang selanjutnya akan disingkat menjadi PMK) tentang insentif pengurangan pajak untuk Wajib Pajak terdampak COVID-19 hingga 31 Desember 2021. Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan meningkatkan daya beli, membantu likuiditas dan kelangsungan usaha untuk memulihkan perekonomian nasional yang masih terdampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020. (pen.kemenkeu.go.id, diunduh pada 13 Oktober 2022 pukul 15.50). Pada tahun 2022, kebijakan perpajakan berupa implementasi UU Harmonisasi Perpajakan dan program Pengungkapan Pajak Sukarela (menpan.go.id, diunduh pada 13 Oktober 2022 pukul 11.20).

Seiring dengan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 penerimaan perpajakan meningkat. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2021 hingga tahun 2022.

Berikut merupakan penerimaan APBN dari perpajakan tahun 2017 hingga tahun 2022:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2017 Sampai 2022

Tahun	Penerimaan perpajakan (dalam miliar rupiah)
2017	1.343.529,80
2018	1.518.789,90
2019	1.546.141,90
2020	1.285.136,32
2021	1.375.832,70
2022	1.510.001,20

Sumber : Badan Pusat Statistik,
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Untuk membantu meningkatkan APBN, Wajib Pajak memiliki peran untuk patuh dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari menghitung, menyetor, dan melapor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan informasi DDTCNews, Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia mencapai 84% per akhir tahun 2021. Kepatuhan ini dilihat dari rasio formal kepatuhan formal Wajib Pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (yang kemudian disingkat menjadi SPT) Tahunan. (news.ddtc.co.id, diunduh pada 14 Oktober 2022 pukul 09.10). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Tarmidi, Fitria, dan Purwaningsih membandingkan dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2014. Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2014, menunjukkan bahwa bukan penerapan sistem *e-filing* yang mempengaruhi

kepatuhan Wajib Pajak, melainkan pengetahuan dari Wajib Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Tarmidi, Fitria, dan Purwaningsih, melakukan perubahan variabel. Pada penelitian yang dilakukan 2017 oleh Tarmidi, Fitria, dan Purwaningsih, menjadikan Implementasi aplikasi perpajakan menjadi independent variabel. Penelitian yang dilakukan tersebut, membuat hipotesis yaitu “implementasi aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan”. Dari penelitian tersebut, setelah dilakukan uji hipotesis, hasilnya menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara implementasi aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. (Tarmidi; Fitria; Purwaningsih, 2017, p. 65-73). Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti implementasi aplikasi perpajakan dan pengetahuan Wajib Pajak terkait perpajakan.

Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2019, p. 11) yaitu *official assessment system*, *Self assessment system*, dan *withholding system*. Di Indonesia sendiri, terjadi reformasi sistem pemungutan perpajakan dari *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system* pada tahun 1983. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya *Self assessment system*, diharapkan akan timbul kepatuhan Wajib Pajak. Namun, dalam pelaksanaan *self assessment system*, Wajib Pajak tidak selalu patuh. Ketidakepatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat dilakukan *tax review* atau evaluasi perpajakan.

Menurut Suandy (Suandy, 2016, p. 155), *tax review* merupakan kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak. Tujuannya dilakukan *tax review* agar Wajib Pajak terhindar dari sanksi ataupun pemeriksaan pajak. Dalam melakukan *tax review*, dilihat secara menyeluruh kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Pajak tersebut diantaranya adalah PPh yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1983 Tentang PPh s.d.t UU Nomor 7 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28A, 29, dan UU PPN & PPnBM. Hasil dari *review* tersebut akan terlihat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain melihat kepatuhan, hasil dari *tax review* akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhannya dan terhindar dari sanksi perpajakan.

PT X merupakan Wajib Pajak Badan yang sudah berdiri sejak tahun 2007, merupakan Pengusaha Kena Pajak. Usaha yang dilakukan PT X merupakan perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan juga perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Di dalam usaha yang dilakukan oleh PT X, terdapat banyak aspek perpajakan yang dapat diteliti. Aspek perpajakan tersebut berupa PPh Pasal 21 atas pegawai tetap, tidak tetap, dan bukan pegawai. Kemudian PPh Pasal 22 atas impor dan pembelian barang oleh pemerintah dan PPh Pasal 23 yang dipotong dan sebagai pemotong. PPh Pasal 25 sebagai angsuran yang harus disetor setiap bulannya dalam 1 tahun pajak dan PPh Pasal 29 atas pajak kurang bayar yang diperhitungkan di akhir tahun. Kemudian PT

X juga dipotong dan memotong PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu PT X dipotong atas bunga deposito dan pekerjaan konstruksi dalam proses pemasangan barang sedangkan PT X memotong atas pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor. Selain PPh, terdapat aspek perpajakan berupa PPN karena PT X merupakan Pengusaha kena pajak, maka PT X memiliki kewajiban juga untuk menghitung, menyetor, dan melapor PPN. Pada pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh PT X, tidak ada kegiatan penjualan barang mewah. Karena itu, dalam pelaksanaan perpajakan *self assessment system*, hanya dilakukan kewajiban PPh Badan dan PPN saja. Karena PT X merupakan Wajib Pajak, maka PT X berkontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan perpajakan di dalam APBN. Karena itu, kepatuhan PT X yang telah dilakukan perlu dilihat dengan melakukan *tax review*.

Kepatuhan Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara. PT X sebagai Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk melihat kepatuhan PT X dalam melaksanakan kewajibannya, maka akan dilakukan *tax review*. Dalam *review* yang akan dilakukan, dilihat kewajiban perpajakan PT X sebagai Wajib Pajak Badan dalam periode tiga tahun yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020. Dari latar belakang masalah yang ada maka, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “*Tax Review* Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai PT X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka untuk mengetahui masalah lebih dalam, identifikasi masalah yang dibuat diantaranya :

1. Apa saja yang menjadi hak PT X selama tahun 2018 sampai 2020?
2. Apa saja yang menjadi kewajiban PT X selama tahun 2018 sampai 2020?
3. Apa saja hak yang dimanfaatkan oleh PT X selama tahun 2018 sampai 2020?
4. Apakah PT X melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU yang berlaku?
5. Bagaimana tingkat kepatuhan PT X terkait dengan kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak apa saja yang dimiliki oleh PT X.
2. Untuk mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh PT X selama tahun 2018 sampai 2020
3. Untuk menganalisis pemanfaatan hak yang dilakukan oleh PT X
4. Untuk menganalisis apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan PT X sesuai dengan UU yang berlaku.
5. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan PT X dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

1.4 Objek Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan PT X yang berada di daerah Cengkareng, Tangerang. PT X merupakan Wajib Pajak yang melakukan *self assessment system*

untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Selain melakukan *self assessment system*, PT X sebagai pihak ketiga yang memotong ataupun memungut PPh dan PPN.